



LAKIP 2025

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANGGARAI**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Manggarai, tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target berhasil dilampaui, namun dilain pihak beberapa target belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada di luar kendali Dinas PMD Kabupaten Manggarai. Namun demikian, secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan selama Tahun 2025.

Kami memandang bahwa pencapaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari upaya kerja sama tim yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus ditingkatkan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan cara seperti ini, Dinas PMD Kabupaten Manggarai menjadi Perangkat Daerah yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kami di tahun berikutnya

Ruteng, 12 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten
Manggarai

Petrus C. Masangkat, S.Sos
Pembina Utama Muda-IV/c
Nip. 19670429 198903 1 008

RINGKASAN EXECUTIVE

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai telah bekerja di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (result oriented government). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan 1 sasaran dengan 3 indikator sasaran.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut ini :

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
1	≥ 100%	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
2	80%<dan ≤ 100%	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
3	60%<dan ≤ 80%	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
4	≤ 60%	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2025 yang juga merupakan capaian kinerja ke-3 periode perencanaan 2021-2026 adalah sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Jlh Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja sasaran	Istimewa ≥ 100%		Baik 80%< dan ≤ 100%		Cukup 60%< dan ≤ 80%		Kurang ≤ 60%	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran	3	103,61	2	155,41					1	0%

Rincian capaian kinerja sasaran dan indikator sebagai berikut:

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET	REALISA SI	CAPAI AN KINERJ A (%)
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	4	0	0
		Jumlah desa berkembang	Desa	85	102	120
		Jumlah desa tertinggal	Desa	20	16	80
	Rata-rata Sasaran					66,66
	Rata-rata					Cukup

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran adalah 66,66 % kategori kinerja CUKUP. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator. Dari 3 (tiga) indikator, terdapat 2 indikator dengan rata –rata capaian 120,00% dan 80,00% kategori kinerja ISTIMEWA dan BAIK, terdapat 1 (satu) indikator atau 0% kategori KURANG.

Secara keseluruhan Dinas PMD Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan pembiayaan langsung seluruh program dan kegiatannya sebesar **Rp. 5.177.848.561.-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 4.710.300.554,- (90,97%)**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung Sasaran Strategis sebesar **Rp. 3.059.734.424,-** Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi pengeluaran keuangan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu sebesar **Rp. 2.689.110.761,-** dari total dana belanja langsung program/kegiatan pendukung sasaran strategis yang dialokasikan dalam DPA Dinas PMD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

Ruteng, 12 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten
Manggarai

Petrus C. Masangkat, S.Sos
Pembina Utama Muda-Iv/c
Nip. 19670429 198903 1 008

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas PMD	
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EXECUTIVE ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai 2

1.3 Struktur Organisasi 2

1.4 Sumber Daya Manusia Aparatur 4

1.5 Sistematika Penulisan LAKIP 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026 9

2.2 Indikator Kinerja Utama..... 11

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 14

3.2 Capaian Kinerja Organisasi..... 15

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....16

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya.....17

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....18

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025..... 18

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25

3.4.1 Sumber Daya Manusia Aparatur 25

3.4.2 Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025.....26

3.4.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis.....26

3.4.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran..... 28

BAB IV PENUTUP..... 30

LAMPIRAN:

- 1. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 20255

Tabel 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....6

Tabel 1. 3 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas PMD Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan,
Jabatan dan Pangkat / Golongan7

Tabel 1. 4 Daftar Jabatan Struktural Dan Eselon Dinas PMD Tahun 2025.....8

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.....10

Tabel 2. 2 Matriks Indikator Kinerja Utama.....11

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 202513

Tabel 3. 1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini16

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan..17

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-202618

Tabel 3. 4 Status IDM Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2025.....19

Tabel 3. 5 Gambaran Umum Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2025.....21

Tabel 3. 6 Analisis Komparatif Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2025.....23

Tabel 3. 7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 202424

Tabel 3. 8 Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan25

Tabel 3. 9 Jumlah PNS menurut Golongan25

Tabel 3. 10 Realisasi APBD Dinas PMD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.....26

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025.....27

Tabel 3. 12 Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 202529

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur staf yang berfungsi membantu Bupati dalam merumuskan berbagai kebijakan, harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Capaian kinerja yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tepat, jelas dan terukur agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik KKN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Dalam LKIP ini akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang diukur dengan menggunakan indikatornya masing-masing. Fokus pembenahan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 4 (empat) komponen kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. LKIP Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 juga merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai tentang, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

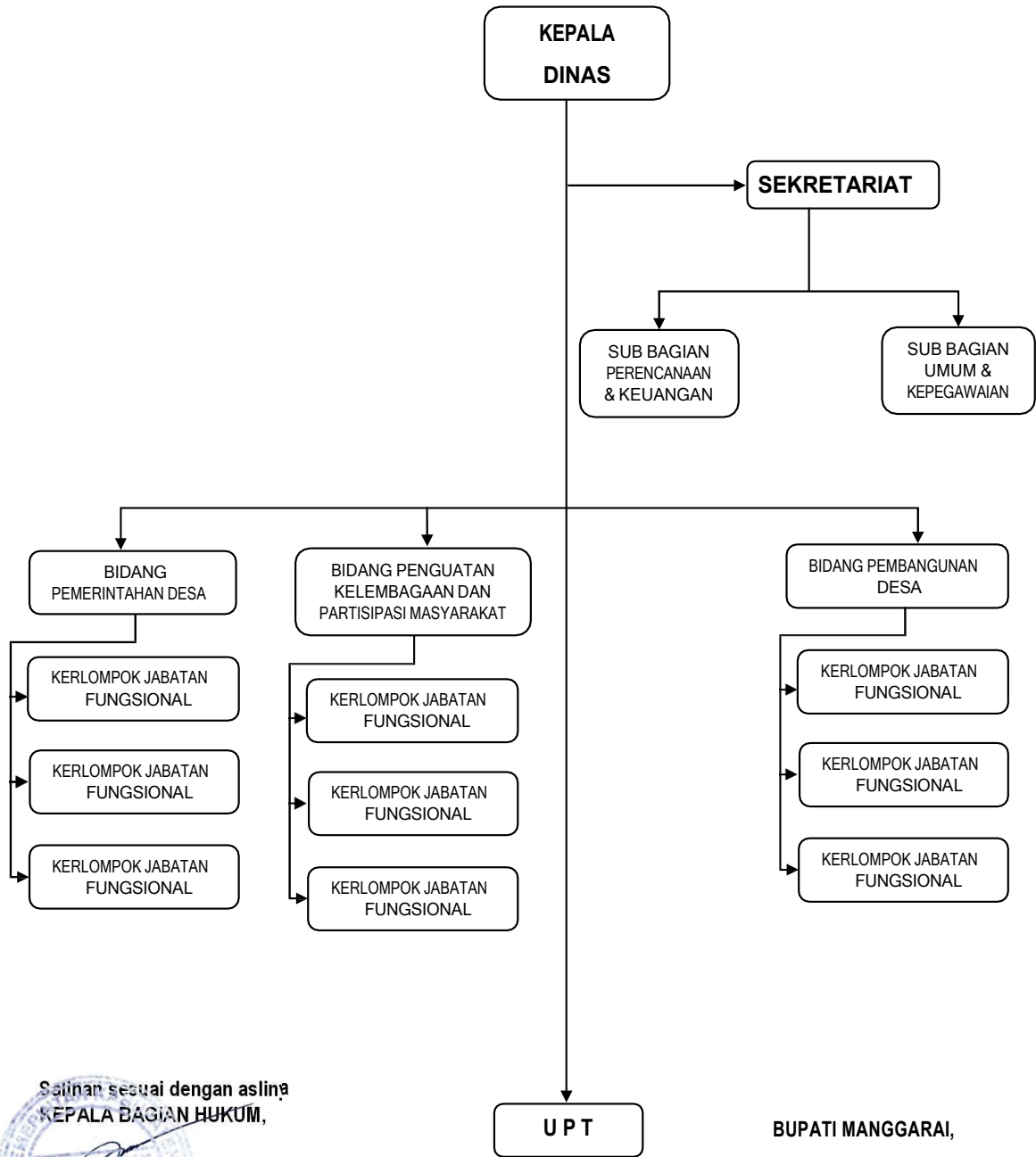
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Pembangunan Desa;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TIPE : B

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Franciskus Cory Gabur, MH
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 198312132011011010

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

1.4 Sumber Daya Manusia Aparatur

Berdasarkan struktur organisasi di atas jumlah jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai 5 jabatan struktural dengan rincian Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) berjumlah 1 (satu) orang, Jabatan Administrator (eselon III) berjumlah 4 (empat) orang dan Jabatan Pengawas (eselon IV) berjumlah 2 (dua) orang. Sedangkan jumlah jabatan fungsional ahli muda hasil penyetaraan jabatan sebanyak 7 (delapan) orang.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai yaitu 27 (dua puluh enam) orang, dengan rincian PNS berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, PPPK 3 (tiga) orang dan Non ASN sebanyak 2 (dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut ini:

Tabel 1. 1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

No.	Unit Kerja	Golongan																PPPK	Non ASN	Jml
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d			
1.	Plt. Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		1
3.	Kabid Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		1
4.	Kabid Pembangunan Desa	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5.	Kabid PKPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	1	9
7.	Bidang Pemerintahan Desa								1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
8.	Bidang Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4
9.	Bidang PKPM	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
10.	Penjabat Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total								1	2	3	3	2	6	3	1	1		3	2	27

Tabel 1. 2
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan																	Jumlah
		Pegawai Negeri Sipil						PPPK					Non ASN						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3	S1	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kabid Pemerintahan Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Kabid Pembangunan Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Kabid PKPM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Sekretariat	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	9
7.	Bidang Pemerintahan Desa	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8.	Bidang Pembangunan Desa	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
9.	Bidang PKPM	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
10.	Penjabat Kepala Desa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total				9	2	10	1			-		2			1	-	1	1	27

Tabel 1. 3
Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas PMD Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan,
Jabatan dan Pangkat / Golongan

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan	Pangkat / Gol.
1	Petrus C. Masangkat, S.Sos	S-1	Plt. Kepala Dinas	Pembina Utama Madya- IV/c
2	Drs. Henry F. Makanoneng	S-1	Sekretaris	Pembina TK.I – IV/b
3	Paulus K. Gani, S.STP	S-1	Kabid Pembangunan Desa	Pembina– IV/a
4	Heribertus W.G, S.STP,m.TR.IP	S-2	Kabid PKPM	Pembina – IV/a
5	Ferdinandus Egar, S.STP	S-1	Kabid Pemdes	Pembina – IV/a
6	Fransiskus Magang	SMA	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata Tk. I – III/d
7	Benedikta Karolina Sedia	SMA	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata Tk. I – III/d
8	Germana Ag.M.F.Basan, SE	S-1	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata Tk. I – III/d
9	Marianus Kordula Malur, SE	S-1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I – III/d
10	Theodora Yustina Erisari	SMA	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata – III/c
11	Servasius Iron, A.Md	D-3	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata – III/c
12	Octaviany W. Claudius, S.Ap	S-1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata – III/c
13	Saveriana L. Mutiara, SE	S-1	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata – III/c
14	Emilia Wio	SMA	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata Muda Tk. I – III/b
15	Elisabet Lovita Eli, A.Md	D-3	Penggerak Swadaya Masyarakat	Penata Muda Tk. I – III/b
16	Kanisius Tulur	SMA	Staf	Penata Muda Tk. I – III/b
17	Aloysius Jemaman	SMA	Staf	Penata Muda – III/a
18	Felomena Imul	SMA	Staf	Penata Muda – III/a
19	Stefanus Garus	SMA	Staf	Penata Muda – III/a
20	Laurensius M.N. Waso, SE	S-1	Staf	Penata Muda – III/a
21	Adriana Kliyani Tatik	SMA	Staf	Pengatur – II/d
22	Agustinus J. Parut	SMA	Staf	Pengatur – II/c
23	Rosalina K. Afra Kama	SMA	Staf	Pengatur – II/c

Tabel 1. 4
Daftar Jabatan Struktural Dan Eselon Dinas PMD Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	II A	Plt.
2.	Sekretaris Dinas	1	III A	Sudah Terisi
3.	Kepala Bidang	3	III B	Sudah Terisi
4.	Kepala Seksi /Penggerak Swadaya Masyarakat	7	IV A	Sudah Terisi
5.	Kepala Sub Bagian	2	IV A	Sudah Terisi
J u m l a h		14	-	

1.5 Sistematika Penulisan LAKIP

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajiannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Bab IV Penutup

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Visi

Berdasarkan Visi Kabupaten Manggarai “**MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING**”,

Misi

- 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia.
- 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
- 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup.
- 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mengemban misi ke-2 yaitu **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026
 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN		SASARAN		SATUAN
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Persentase Status Desa Berkembang	Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah desa mandiri	Desa
				Jumlah desa berkembang	Desa
				Jumlah desa tertinggal	Desa

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2025	2025	2026	
1.	Persentase Desa Berkembang	Persen	32.41	39.31	46.21	53.10	60.00	66.90	66.90
2.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
	persentase peningkatan status desa berkembang	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	0	7,86	15,71	23,57	31,43	39,29	39,29
	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Persen	2,76	-	4,14	5,52	6,90	8,28	8,28
	Persentase peran tim penggerak PKK dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2025	2025	2026	
	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Sistem Pelayanan	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	1	2	4	7	7
	Jumlah Desa Berkembang	Desa	47	56	65	75	85	90	90
	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	93	79	60	40	20	0	0
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	0	11	22	33	44	55	55

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 800/5/I/DPMD/2022.

Tabel 2. 2
Matriks Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Persentase status desa berkembang	Persen	Jumlah desa berkembang dibagi jumlah seluruh desa kali 100%	Bidang Pemerintahan Desa dan Sekretariat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai ditetapkan sebagai Persentase Desa Berkembang, yang diukur berdasarkan hasil penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas

fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM Tahun 2020–2025, capaian IKU Persentase Desa Berkembang menunjukkan tren yang fluktuatif namun berada pada level dominan, sekaligus mencerminkan proses transisi desa menuju status yang lebih tinggi. Pada Tahun 2025, jumlah desa berkembang tercatat sebanyak 102 desa dari total 145 desa, atau setara dengan 70,34%. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Manggarai telah berada pada kategori berkembang, yang menjadi basis utama peningkatan status desa ke kategori maju dan mandiri.

Dinamika jumlah desa berkembang selama periode evaluasi tidak hanya mencerminkan stagnasi, tetapi juga pergeseran status desa berkembang menjadi desa maju, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan signifikan jumlah desa maju pada periode yang sama. Dengan demikian, penurunan jumlah desa berkembang pada tahun tertentu harus dipahami sebagai indikator keberhasilan peningkatan status desa, bukan penurunan kinerja.

Secara kinerja, capaian IKU Persentase Desa Berkembang tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan Dinas PMD telah efektif dalam mendorong peningkatan kualitas desa, khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, masih diperlukan intervensi yang lebih terfokus dan terukur agar desa berkembang dapat secara konsisten naik kelas menjadi desa maju dan selanjutnya desa mandiri.

Capaian Persentase Desa Berkembang sebesar 70,34% pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Dinas PMD Kabupaten Manggarai berada pada kategori baik, dengan tren pembangunan desa yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kemandirian desa. Indikator ini sekaligus menjadi dasar penajaman strategi dan kebijakan pada periode berikutnya untuk mempercepat transformasi desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Setda untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Setda bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (by design and sustainable). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam pemberian penghargaan dan sanksi dan juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	4
		Jumlah desa berkembang	Desa	85
		Jumlah desa tertinggal	Desa	20
2	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Presentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	3

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penataan Desa	441.112.000	APBDP
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.774.671.076	APBDP
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	843.951.348	APBDP
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.118.114.137	APBDP
JUMLAH		5.177.848.561	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
1	≥ 100%	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
2	80%<dan ≤ 100%	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
3	60%<dan ≤ 80%	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
4	≤ 60%	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	4	0	0
		Jumlah desa berkembang	Desa	85	102	120
		Jumlah desa tertinggal	Desa	20	16	80
	Rata-rata Sasaran					66,66

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas terdapat capaian indikator tujuan yang melebihi target sebanyak 2 indikator atau 120,00% dan 80% dan capaian indikator tujuan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator atau 0%.

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya									
No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	2	0	0,00	4	0	0,00
		Jumlah desa berkembang	Desa	75	115	153,33	85	102	120,00
		Jumlah desa tertinggal	Desa	40	17	157,50	20	16	80,00
	Rata-rata Sasaran					103,61			66,66
	Kategori Sasaran				Istimewa			Cukup	

Tabel 3.2 tersebut di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai 66,66% dengan predikat CUKUP. Capaian kinerja 66,66%, tahun 2025 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 103,61% dengan kategori ISTIMEWA.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	4	0	0,00	7	0,00
		Jumlah desa berkembang	Desa	85	102	120,00	90	88,23
		Jumlah desa tertinggal	Desa	20	16	80,00	0	11,03
	Rata-rata Sasaran					66,66		33,08
	Kategori Sasaran				ISTIMEWA		KURANG	

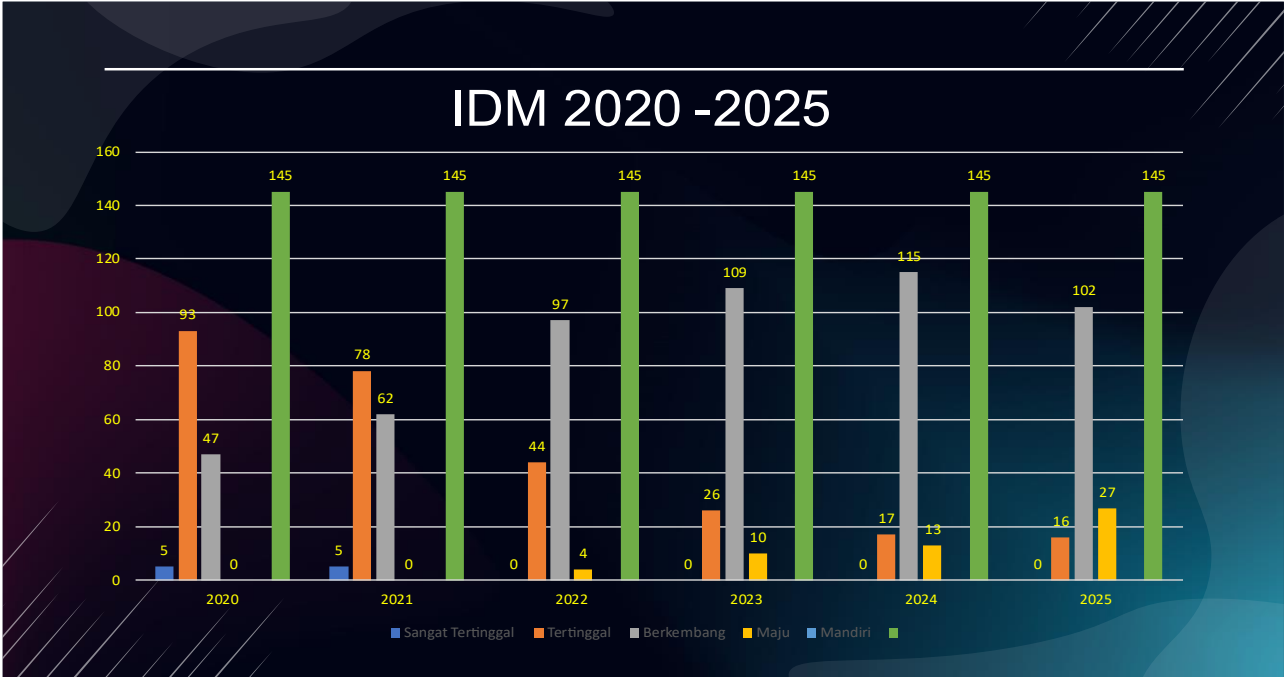
Tabel 3.4 tersebut di atas menginformasikan bahwa realisasi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar 33,08 % dengan kategori KURANG.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN DESA
Indikator : Presentasi Status Desa Berkembang
Target 58,62 → Realisasi 120,00 → Capaian Kinerja 120,00% → ISTIMEWA

Tabel 3. 4
Status IDM Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2025

Kategori/Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sangat Tertinggal	5	5	0	0	0	0
Tertinggal	93	78	44	26	17	16
Berkembang	47	62	97	109	115	102
Maju	0	0	4	10	13	27
Mandiri	0	0	0	0		0
	145	145	145	145	145	145



Sumber : Dinas PMD dan <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>, 2025

Analisis Perkembangan Status Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2020–2025 Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020–2025, jumlah desa di Kabupaten Manggarai tetap sebanyak 145 desa. Selama periode tersebut terjadi perbaikan kualitas status desa yang konsisten, yang tercermin dari penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal serta peningkatan desa berkembang dan desa maju. Pada awal periode (Tahun 2020), struktur status desa masih didominasi oleh desa tertinggal dan sangat tertinggal, dengan belum adanya desa berstatus maju maupun mandiri. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian dan daya saing desa. Namun demikian, pada Tahun 2021 mulai terlihat perbaikan, ditandai dengan penurunan desa

tertinggal dan peningkatan desa berkembang, yang mengindikasikan mulai efektifnya intervensi pemerintah daerah pada indeks komposit sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari indeks komposit Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Perbaikan kinerja yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2022, di mana desa sangat tertinggal berhasil dieliminasi dan jumlah desa tertinggal menurun secara substansial, bersamaan dengan munculnya desa berstatus maju. Tren ini berlanjut pada Tahun 2023 dan 2024 dengan peningkatan konsisten jumlah desa maju serta penurunan berkelanjutan desa tertinggal, yang mencerminkan penguatan kapasitas pemerintahan desa, efektivitas pendampingan, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa. Pada Tahun 2025, kinerja pembangunan desa menunjukkan akselerasi peningkatan kualitas desa, ditandai dengan kenaikan signifikan desa berstatus maju dan penurunan lanjutan desa tertinggal. Meskipun desa mandiri belum terbentuk, dominasi desa berkembang menunjukkan adanya basis transisi yang kuat untuk peningkatan status desa pada periode perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian IDM Tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai berada pada tren positif, dengan indikator utama berupa:

1. Penurunan jumlah desa tertinggal dan eliminasi desa sangat tertinggal,
2. Peningkatan jumlah desa maju secara berkelanjutan, dan
3. Stabilitas jumlah desa berkembang sebagai dasar peningkatan status desa.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD telah berkontribusi efektif terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi pada desa berkembang agar mampu naik kelas menjadi desa maju dan mandiri.

Implikasi dan Tindak Lanjut

Hasil analisis ini menjadi dasar bagi penajaman kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya, khususnya melalui:

- peningkatan kualitas pendampingan desa secara tematik,
- penguatan tata kelola dan kemandirian ekonomi desa, serta
- optimalisasi sinergi program lintas perangkat daerah.

Tabel 3. 5
Gambaran Umum Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2025

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	Σ DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA	RANK
1	Nusa Tenggara Timur	Kupang	160	117,04	57,33	79,13	50,84	37,03	62,60	0,64	Berkembang	355
2	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	266	103,72	50,45	66,52	43,02	33,90	58,81	0,56	Tertinggal	394
3	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	182	115,19	57,69	75,51	47,76	39,12	59,49	0,62	Berkembang	371
4	Nusa Tenggara Timur	Belu	69	118,61	61,04	81,45	55,39	41,75	59,55	0,66	Berkembang	332
5	Nusa Tenggara Timur	Alor	158	119,30	57,06	72,54	49,71	36,96	59,49	0,62	Berkembang	369
6	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	229	135,36	67,55	99,82	62,58	42,03	65,17	0,74	Maju	180
7	Nusa Tenggara Timur	Sikka	181	129,77	55,55	90,20	46,89	39,07	62,44	0,67	Berkembang	319
8	Nusa Tenggara Timur	Ende	255	115,35	55,11	74,05	45,97	36,74	55,84	0,60	Berkembang	379
9	Nusa Tenggara Timur	Ngada	190	121,55	55,63	84,77	49,74	35,78	62,08	0,64	Berkembang	347
10	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	145	120,03	55,91	78,83	50,17	38,84	57,37	0,63	Berkembang	360
11	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	140	117,86	60,56	77,41	50,09	35,17	61,44	0,63	Berkembang	357
12	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	63	112,35	57,98	70,32	44,44	36,03	54,60	0,59	Berkembang	384
13	Nusa Tenggara Timur	Lembata	144	125,23	65,17	74,75	54,79	41,44	65,42	0,67	Berkembang	309
14	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	112	112,07	62,03	88,30	47,82	31,14	60,96	0,63	Berkembang	358
15	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	164	119,23	58,18	82,60	48,82	36,76	58,68	0,64	Berkembang	354
16	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	97	117,46	56,06	79,05	51,93	35,66	59,66	0,63	Berkembang	362
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	65	116,37	55,14	72,91	45,40	33,23	61,11	0,60	Berkembang	376
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	173	103,21	52,62	69,21	43,23	31,54	53,73	0,56	Tertinggal	397
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	159	121,32	59,92	75,25	46,48	36,28	57,38	0,62	Berkembang	367
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	58	114,43	49,71	62,86	42,78	29,38	57,24	0,56	Tertinggal	395
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka	127	132,44	59,51	84,54	52,57	41,57	61,66	0,68	Berkembang	296

Berdasarkan tabel Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada pada status “Berkembang”, dengan rentang skor indeks yang relatif berdekatan. Nilai skor indeks kabupaten/kota di Provinsi NTT secara umum berada pada kisaran 0,56 hingga 0,66, yang mencerminkan kondisi pembangunan desa yang masih memerlukan penguatan lintas dimensi.

Rata-rata skor Indeks Desa Provinsi NTT Tahun 2025 tercatat sebesar $\pm 0,629$, yang menjadi tolok ukur dalam menilai posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

Posisi dan Kinerja Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah desa: 145 desa
- Skor Indeks Desa: 0,6317
- Status: Berkembang
- Peringkat nasional: 360

Secara agregat, skor Kabupaten Manggarai berada di atas rata-rata Provinsi NTT, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa di Kabupaten Manggarai relatif lebih baik dibandingkan rerata kabupaten/kota lain di NTT.

Perbandingan dengan Kabupaten Lain di NTT

1. Dibandingkan dengan kabupaten berkinerja lebih rendah, seperti Timor Tengah Selatan (skor $\pm 0,561$) dan beberapa kabupaten kepulauan, Kabupaten Manggarai menunjukkan keunggulan terutama pada:
 - Dimensi Layanan Dasar
 - Dimensi Ekonomi Desa
2. Dibandingkan dengan kabupaten dalam satu wilayah Manggarai Raya:
 - Manggarai Barat memiliki skor sedikit lebih tinggi ($\pm 0,6366$)
 - Manggarai Timur memiliki skor lebih rendah ($\pm 0,6246$)

Hal ini menempatkan Kabupaten Manggarai pada posisi menengah–atas di kawasan Manggarai Raya, meskipun masih terdapat ruang peningkatan agar dapat sejajar dengan kabupaten yang memiliki skor tertinggi.

3. Dibandingkan kabupaten dengan skor tertinggi di NTT (di atas $\pm 0,65$), Kabupaten Manggarai masih menghadapi tantangan pada:
 - Dimensi Aksesibilitas
 - Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dua dimensi ini menjadi faktor pembeda utama antara Kabupaten Manggarai dan kabupaten dengan performa indeks desa terbaik di provinsi.

Implikasi dan Arah Perbaikan

Capaian Indeks Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan desa telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Dengan status Berkembang dan skor di atas rata-rata provinsi, fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada:

- Penguatan aksesibilitas desa (transportasi, konektivitas, dan layanan dasar pendukung),

- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta
- Konsolidasi capaian ekonomi dan layanan dasar agar mendorong transisi desa menuju status yang lebih tinggi.

Analisis Komparatif Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Analisis Komparatif Indeks Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2025				
Kabupaten	Skor Indeks Desa	Status	Posisi Relatif terhadap Manggarai	Uraian Analisis Komparatif
Manggarai	0,6317	Berkembang	Basis Pembanding	Skor Indeks Desa Kabupaten Manggarai berada di atas rata-rata provinsi dan mencerminkan kinerja pembangunan desa yang relatif stabil, khususnya pada dimensi layanan dasar dan ekonomi desa.
Manggarai Barat	0,6366	Berkembang	Sedikit lebih tinggi	Memiliki keunggulan pada dimensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga skor agregat sedikit melampaui Manggarai.
Manggarai Timur	0,6246	Berkembang	Lebih rendah	Skor berada di bawah Manggarai, terutama dipengaruhi oleh capaian aksesibilitas dan ekonomi desa yang belum optimal.
Ngada	0,645	Berkembang	Lebih tinggi	Unggul pada dimensi layanan dasar dan ekonomi desa, menunjukkan efektivitas intervensi pembangunan desa yang lebih merata.
Sikka	0,6676	Berkembang	Jauh lebih tinggi	Memiliki kinerja kuat pada dimensi ekonomi dan layanan dasar, sehingga mampu menempatkan diri pada kelompok atas kabupaten di NTT.
Flores Timur	0,7441	Maju	Signifikan lebih tinggi	Menjadi kabupaten dengan skor tertinggi di NTT; keunggulan merata pada hampir seluruh dimensi, khususnya ekonomi, layanan dasar, dan tata kelola.
Lembata	0,6721	Berkembang	Lebih tinggi	Memiliki skor tata kelola dan layanan dasar yang lebih kuat dibanding Manggarai.
Kupang	0,6362	Berkembang	Sedikit lebih tinggi	Perbedaan skor relatif tipis; keunggulan Kupang terdapat pada tata kelola pemerintahan desa.
Sumba Timur	0,6339	Berkembang	Hampir setara	Skor relatif sejajar dengan Manggarai, dengan perbedaan kecil pada dimensi sosial dan tata kelola.
Ende	0,6032	Berkembang	Lebih rendah	Skor di bawah Manggarai, dipengaruhi oleh keterbatasan capaian ekonomi dan aksesibilitas desa.

Kabupaten	Skor Indeks Desa	Status	Posisi Relatif terhadap Manggarai	Uraian Analisis Komparatif
Timor Tengah Utara	0,6217	Berkembang	Lebih rendah	Kinerja layanan dasar cukup baik, namun tertahan oleh dimensi ekonomi dan lingkungan.
Timor Tengah Selatan	0,5613	Tertinggal	Jauh lebih rendah	Skor jauh di bawah Manggarai, terutama pada dimensi ekonomi, aksesibilitas, dan tata kelola desa.
Sumba Barat Daya	0,5568	Tertinggal	Jauh lebih rendah	Masih menghadapi tantangan multidimensi, sehingga tertinggal dibanding Manggarai.
Sabu Raijua	0,5613	Tertinggal	Jauh lebih rendah	Keterbatasan aksesibilitas dan ekonomi desa menjadi faktor utama rendahnya skor indeks.
Malaka	0,6808	Berkembang	Lebih tinggi	Memiliki keunggulan signifikan pada layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa.

Kesimpulan Analitis

Secara komparatif, Kabupaten Manggarai berada pada kelompok menengah–atas kabupaten/kota di Provinsi NTT. Skor Indeks Desa Kabupaten Manggarai lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten tertinggal dan berkembang rendah, namun masih berada di bawah kabupaten dengan kinerja unggul seperti Flores Timur, Sikka, dan Malaka. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai memiliki fondasi pembangunan desa yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan terutama pada Dimensi aksesibilitas desa dan Dimensi tata kelola pemerintahan desa, agar mampu mengejar kabupaten dengan skor indeks desa tertinggi di Provinsi NTT.

Setiap tahun, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melakukan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rata-rata nilai hasil evaluasi tersebut adalah 76,35% kategori BB atau SANGAT BAIK. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut berikut:

Tabel 3. 7
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Bobot Komponen			Total nilai
			keberadaan	kualitas	Pemanfaat an	
			20%	30%	50%	
1	Perencanaan Kinerja	30	5,40	8,10	13,50	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	5,40	6,30	13,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	2,70	2,70	5,25	10,50

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,50	5,25	3,75	17,50
	Nilai Evalasi AKIP	100	18,00	22,80	36,00	76,35
	Nilai Akuntabilitas Kinerja					BB

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan good and clean governance. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

3.4.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai sampai 31 Desember 2025 berjumlah 27 orang, yang terdiri dari PNS berjumlah 22 orang (81,48%) dan PPPK 3 orang (11,11%), Pegawai Non ASN berjumlah 2 orang (7,40%) Adapun komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	%
1.	SD					
2.	SMP /Sederajat					
3.	SMA/Sederajat	9	1	-	10	37,03
4.	Diploma III/Akta III	2	-	-	2	7,40
5.	S-1/Akta IV	10	2	1	11	40,74
6.	S-2	1	-	1	2	7,40
7.	S-3	-	-	-	-	0,00
JUMLAH		22	3	2	27	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, komposisi Pegawai ASN Lingkup Dinas PMD Kabupaten Manggarai tahun 2025, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA dan S-1/Akta IV yang mencapai 37,03% dan 40,74% disusul tingkat pendidikan Diploma III dan S-2 yang mencapai 7,40%.

Tabel 3. 9
Jumlah PNS menurut Golongan

GOLONGAN				RUANG					
		0	80%	A	B	C	D	JUMLAH	%
1	I			0	0	0	0	0	0
2	II					1	2	3	12
3	III			2	3	2	6	13	52
4	IV			3	1	1	0	5	20
5	CPNS		1					1	4

6	PPPK	3						3	12
Jumlah		3	1	5	4	4	8	25	100

Komposisi Pegawai (PNS) Dinas PMD Kabupaten Manggarai tahun 2025 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 52,00%, disusul golongan IV sebesar 20,00%.

3.4.2 Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **5.177.848.561,-** realisasi sebesar Rp. **4.710.300.554,-** atau sebesar 90.97 %.

Tabel 3. 10
Realisasi APBD Dinas PMD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	-	-	-
2	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	1.951.186.337	1.859.573.493	95.30
	Belanja Barang dan Jasa	3.226.662.224	2.850.727.061	88.35
	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	5.177.848.561	4.710.300.554	90.97

3.4.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran s/d Triwulan ini (Rp.)	% Penyerapan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MENINGKATN YA KEBERDAYA AN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.118.114.137, 00	2.021.189.793, 00	95,42
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.011.200,00	10.910.800,00	99,09
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.972.186.337,00	1.880.573.493,00	95,35
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.666.600,00	76.045.100,00	99,19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.700.000,00	39.083.000,00	91,53
		PROGRAM PENATAAN DESA	441.112.000	184.307.691	41,78
		Penyelenggaraan Penataan Desa	441.112.000	184.307.691	41,78
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.774.671.076	1.679.753.396	94,65
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.774.671.076	1.679.753.396	94,65
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT	843.951.348	825.049.674	97,76

NO .	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan ini (Rp.)	% Penyerapan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	843.951.348	825.049.674	97,76
TOTAL ANGGARAN			5.177.848.561	4.710.300.554	90,97

3.4.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Efektif apabila target kinerja sasaran nya tercapai.

Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	66,66	Efektif	90,97	Efisien
Rata-rata		66,66	Efektif	99,21	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.13 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran 66,66% ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 90,97%, menunjukan penggunaan anggaran pada Dinas PMD Kabupaten Manggarai yang efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori tertentu. Kategori capaian menunjukkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai beberapa prinsip dan salah satunya adalah akuntabilitas. Prinsip ini membuka ruang adanya control masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol tersebut harus direspons dengan baik oleh pemerintah. LKIP ini dibuat untuk merespons kontrol masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Dinas PMD telah memperlihatkan capaian kinerja yang ISTIMEWA atas sasaran strategisnya. Uraian terinci atas sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Tahun 2025	
		Nilai Capaian Kinerja	Kategori / Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	66,66	CUKUP
RATA-RATA		66,66	CUKUP

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritikan yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekedar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup ataupun Kurang, tetapi terutama untuk mewujudkan MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING.

Segala keberhasilan yang dicapai merupakan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan atas 4 Program, 8 Kegiatan dan 27 Subkegiatan dalam 1 Sasaran dan 3 Indikator Kinerja Sasaran diharapkan tidak mengurangi makna pertanggungjawaban yang meliputi aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya. Terima Kasih.

Ruteng, 12 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten
Manggarai,

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas PMD	
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

Petrus C. Masangkat, S.Sos
Pembina Utama Muda-IV/c
Nip. 19670429 198903 1 008